

REKONSTRUKSI BANGSA MENUJU MASA DEPAN INDONESIA

Benni Setiawan

Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga

Abstract

This paper tries to descript reconstruct nation and state system. This idea dreams for reality nation colaps. This paper some not pretention for answer, but try to giving some alternative. There are : reconstruct on politic, economic, education and law. In politic department, that will trying how to control of peoples is very signifikan in the way of good government. In economics department, will exsplain economics development, that'll begaining from develop empowering peoples. Law department, only limited on child protected development, because the child is property of country who must be protected and continuous. Education department, will exsplain how the cost of education still few, so many people who can't enjoying right and how degradation of morality generation of country in now days.

Kata Kunci : *Rekonstruksi, Politik, Ekonomi, Hukum, Pendidikan*

I. Pendahuluan

Pemilihan umum tahun 2004 sudah berlangsung.¹ Pemilu merupakan tonggak atau harapan masa depan bangsa Indonesia, karena dengannya

¹ Hajat akbar nasional yang didasarkan secara yuridis pada UU. No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, UU. No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, UU. No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik seperti diketahui bersama telah berhasil dengan Pemilihan Umum tahap pertama tanggal 5 April 2004 guna memilih anggota legislatif dengan Golkar, PDI-P, PPP, PKB, Partai Demokrat, PKS dan PAN sebagai partai yang lolos *electoral treshold* dan berhak mengajukan capres dan cawapres. Pun, tahap kedua adalah pemilu 5 Juli 2004 yang menghasilkan pasangan SBY-Jusuf Kalla dan Megawati Soekarno Putri-Hasyim Muzadi sebagai capres dan cawapres yang berhak masuk final pemilu 20 September 2004, setelah mengalahkan pasangan Wiranto-Wahid (Golkar), Amien-Siswono (PAN) dan Hamzah

rakyat diberi kekuasaan dan keleluasaan untuk menentukan pilihannya berdasarkan hati nurani dan bebas dari tekanan dari pihak manapun. Pemilu juga diharapkan menjadi ancangan bagi berdirinya demokrasi yang sedang berlangsung bagi sebuah negara.²

Namun, masyarakat juga tidak boleh terkecoh dengan gegap gempita pemilu. Pemilu seharusnya dikontrol bersama agar dapat menghasilkan produk atau tatanan kehidupan masyarakat yang baru, dapat mensejahterakan rakyat dan harapan besar kita adalah terciptanya tatanan masyarakat madani.³ Kekuatan inilah yang akan mampu sebagai kontrol terhadap pemerintahan yang korup.

Pemerintahan yang kita harapkan untuk masa yang akan datang mestinya dapat mengakomodir keinginan atau aspirasi rakyat, peduli dengan rakyat dan mampu menyediakan peluang usaha dan lapangan kerja bagi rakyatnya. Tidak seperti apa yang terjadi sekarang ini yaitu banyaknya pengangguran, penggusuran, mahal biaya pendidikan, masih banyaknya anak-anak usia produktif yang tidak sekolah dan kurang diperhatikan hak-haknya, krisis multidimensional yang tak kunjung usai dan masih banyak permasalahan-permasalahan lainnya. Dari beberapa persoalan di atas, ke depan tampaknya pemerintah akan mempunyai "PR" yang berat karena menyangkut eksistensi bangsa.

Untuk menyelesaikan berbagai "PR" bangsa yang semakin berat ini, diperlukan upaya rekonstruksi. Rekonstruksi yang diturunkan dari bahasa

Haz-Agum Gumelar (PPP). Hasil akhir yang dapat kita lihat bersama adalah unggulnya pasangan SBY-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

² Walaupun menurut kenyataan yang ada demokrasi yang diidamkan bersama ternyata masih "jauh panggang dari api", artinya demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia yang diindikasikan dengan pemilu 2004 ternyata masih menyisakan pertanyaan panjang ketika demokrasi kita masih irasional. Sebagai contohnya, dalam masa kampanye pilpres beberapa waktu yang lalu masyarakat betul-betul dijadikan obyek pembodohan, karena hampir semua capres menyulap kata-kata yang mempesona, sehingga tidak rasional dan kehilangan daya kritisnya. Lebih lanjut baca wawancara Ton Martono dengan Heru Nugroho dalam *Suara Muhammadiyah* Edisi No. 15. Th, ke-89, p.16-17.

³ Gellner mendefinisikan masyarakat madani sebagai hal yang bermuatan politis, yaitu masyarakat yang terdiri atas berbagai institusi non pemerintah yang otonom dan cukup kuat untuk dapat mengimbangi negara. Dalam arti luas, masyarakat madani disamping merupakan sekelompok institusi/ lembaga dan asosiasi yang cukup kuat mencegah tirani politik baik oleh negara maupun komunal/ komunitas, juga cirinya yang menonjol adalah kebebasan individu di dalamnya; di mana sebagai sebuah asosiasi dan institusi, ia dapat dimasuki serta ditinggalkan oleh individu dengan bebas. Lebih lanjut baca Ernest Gellner, *Membangun Masyarakat Sipil, Prasyarat Menuju Kebebasan*, (Bandung: Mizan, 1995), lihat juga Adi Suryadi Culla, *Masyarakat Madani Pemikiran, Teori, dan Relevansinya dengan Cita-cita Reformasi*, Cet III, (Jakarta : Rajawali Press, 2002), p. 30-31.

Inggris, *reconstruction* artinya pembangunan kembali.⁴ Rekonstruksi dalam artian ini adalah membangun kembali tatanan bangsa Indonesia dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga akan tercapai cita-cita luhur bangsa Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan rakyat Indonesia dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia.

Tulisan ini akan mencoba menawarkan alternatif guna merekonstruksi tatanan berbangsa dan bernegara. Wacana ini diilhami dari keadaan bangsa yang semakin terpuruk, tetapi tulisan ini tidak berpretensi untuk menyelesaikan persoalan yang berat, setidaknya memberikan pilihan. Beberapa hal yang dianggap penting untuk direkonstruksi yaitu tatanan politik, ekonomi, hukum, dan pendidikan.

II. Rekonstruksi Tatanan Politik

Politik merupakan kata yang sering kita dengar, akan tetapi kita jarang tahu makna politik yang terkandung di dalamnya. Politik menurut Ibnu Khaldun dan Thomas Hobes yaitu berkaitan dengan kekuasaan dalam suatu negara.⁵ Titik puncak dari pengertian kekuasaan itu adalah kebenaran.⁶

Politik adalah segala upaya yang dilakukan dengan cerdas, pintar, licik dengan tujuan untuk menguasai masyarakat dan negara.⁷ Berbagai macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan tersebut.⁸

Roger F. Soltau seperti dikutip Miriam Budiardjo menguraikan bahwa ilmu politik mempelajari tujuan negara dan lembaga-lembaga negara yang akan melaksanakan tujuan tersebut, hubungan antara negara dengan warganegaranya serta dengan dunia lain.⁹ Sedangkan menurut J. Barent ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara,... yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, ilmu politik mempelajari

⁴ John M Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1996), p. 417.

⁵ A. Wahab Al Effendy, *Masyarakat Tanpa Negara*, (Yogyakarta : LKiS, 2000), p. 9

⁶ Kardiman, " Analisis Pengaruh Gejolak Politik dan Regulasi terhadap Gejolak Ekonomi Moneter di Indonesia", dalam www.rudiyet.tripod.com/sem2-012/kardiman.htm

⁷ Abdul Muis, *Titian Menuju Demokrasi*, (Jakarta : Gramedia, 2000), p. 6

⁸ www.ut.ac.id/ol-supp/ppkn3301/batasan-htn-dan-politik.htm

⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cet XXII, (Jakarta : Gramedia Pustaka, 2001), p. 9

negara-negara itu melakukan tugas-tugasnya.¹⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia¹¹, politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan seperti sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat), mengenai pemerintahan negara terhadap negara lain.¹² Kebijakan cara bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu masalah.¹³

Dari beberapa pengertian di atas, politik dapat diartikan sebagai cara mengatur kehidupan kenegaraan. Kehidupan yang diharapkan adalah kehidupan kenegaraan yang penuh dengan kedamaian, ketentraman dan keteraturan. Negara tidak boleh semena-mena memaksakan kehendaknya kepada masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tentram dan nyaman hidup dalam kekuasaan negara dan juga sebaliknya.¹⁴ Tetapi yang terjadi, suhu politik di Indonesia belum dapat menjadikan rakyat nyaman dan tentram serta dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara.

Puncak kegiatan politik suatu negara yang sering diasumsikan dengan pesta demokrasi (pemilu) ternyata masih menyisakan persoalan panjang. Mulai dari *money politics*, penggelembungan suara dan peraturan dari KPU yang berubah-ubah (tidak konsisten) seperti pada kasus pencoblosan surat suara yang tembus pada pemilihan presiden tahap pertama 5 Juli 2004 yang lalu.

Ketika pemilu masih diwarnai bayang-bayang ketidakpastian dan tekanan dari berbagai pihak, maka nasib rakyat semakin tidak menentu. Rakyat mungkin akan lebih sengsara dan semakin dibungkam hak-haknya oleh penguasa. Kalau ini yang terjadi maka kehidupan demokrasi yang kita idamkan bersama tidak akan pernah terwujud atau paling tidak tertunda selama lima tahun mendatang.

Rakyat akan melihat dengan nyata bagaimana pemerintahan yang akan datang hanya diwarnai dengan "politik dagang sapi". Komposisi kabinet dengan penuh KKN, kebebasan berbicara, bertindak, berkehendak menjadi tabu untuk diperbincangkan. Padahal kita ketahui bersama bahwa

¹⁰ J. Barents, *Ilmu Politika: Suatu Perkenalan Lapangan*, terjemahan L.M. Sitorus (Jakarta:PT. Pembangunan,1965), p. 23. sebagaimana dikutip Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, *Ibid.*,

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet 2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), p. 694

¹² *Ibid.*,

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ Benni Setiawan, "HAM dan Transformasi Sosial", dalam *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 38. No. 1, Th. 2004, p. 36

reformasi politik yang kita inginkan adalah memberikan kehidupan demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia yang ditandai dengan pemimpin yang bersih, kabinet maupun anggota dewan didasarkan kepada keahlian dan kejujuran, tidak didasarkan kepada koncoisme dan keluargaisme.¹⁵

Di samping itu reformasi di bidang politik juga berarti bahwa kebebasan pers, kebebasan radio, kebebasan televisi, kebebasan berpendapat dan kebebasan berbicara, mengekspresikan pendapat dan berbicara, kebebasan mengekspresikan pendapat, kebebasan dari rasa takut dan berbagai kebebasan itu harus dijamin oleh negara Republik Indonesia.¹⁶

Walaupun iklim semacam itu sudah mulai terkondisi, akan tetapi kekhawatiran di atas dibungkam menjadi semakin nyata jika pemerintahan yang akan datang tidak sigap dan bijaksana dalam setiap pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil seharusnya benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat dan bukan aspirasi pribadi dan golongan.

Rekonstruksi dalam bidang politik yang lain adalah bagaimana KKN, money politik dapat dicegah.¹⁷ Bagaimana mungkin hal tersebut terwujud jika calon pemimpin bangsa belum jujur terhadap dirinya sendiri, seperti pelaporan harta kekayaan yang masih ditutup-tutupi dan banyak mengindikasikan dana-dana siluman masuk di dalamnya.

Kontrol dari rakyat untuk mengawasi jalannya suatu pemerintahan mutlak diperlukan.¹⁸ Rakyat menentukan peran yang signifikan dalam suatu negara apalagi dalam sistem pemilihan presiden langsung ini. Rakyat adalah *icon* terpenting dalam pengambilan kebijakan dan keputusan. Selama rakyat masih mudah dikibuli, nasibnya tidak akan pernah berubah menjadi

¹⁵ Amien Rais, *Menyembuhkan Bangsa yang Sakit*, Cet I, (Yogyakarta: Adipura, 1999), p. 33

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Karena sejalan dengan roda reformasi yang terus bergulir ternyata kita kehilangan langkah untuk dapat mencegahnya, KKN dan money politics sekarang menjadi bagian yang sudah dianggap biasa oleh masyarakat. Ketika kita ingin menjadi PNS dan TNI mungkin kita harus mengeluarkan puluhan juta rupiah untuk memuluskan cita-cita kita dan hal itu dilakukan terang-terangan di atas meja. Hal inilah yang mungkin menjadi kegelisahan William Chang yang mengungkapkan pada era reformasi yang terus bergulir ini persoalan-persoalan moral semakin menurun kalau tidak mau dikatakan mengalami degradasi moral. Lebih lanjut lihat William Chang, *Kerikil-kerikil di Jalan Reformasi; Catatan-catatan dari Sudut Etika Sosial*, Cet I, (Jakarta: Kompas, 2002)

¹⁸ Revrisond Baswir mengemukakan bahwa untuk memperkecil peluang korupsi, setiap organisasi wajib mengembangkan struktur pengawasan. Semakin efektif struktur pengawasan, maka biasanya semakin kecil peluang terjadinya korupsi di dalam organisasi itu dan sebaliknya. Lebih lanjut baca Revrisond Baswir, "Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Inefektifitas Pengawasan", dalam *Jurnal Media Inovasi* Edisi No. I. Th. VIII/1998. p. 29

korban penghisapan dan penindasan oleh rezim demi rezim penguasa.¹⁹ Rakyat harus banyak belajar berdemokrasi, karena dengannya rakyat akan menjadi tambah dewasa dengan perbedaan pendapat.

Penegakan demokrasi memang harus dibayar dengan harga mahal dan memakan waktu yang cukup lama. Kita tahu bagaimana Amerika mempunyai demokrasi yang cukup ideal setelah merdeka selama 180 tahun. Kemudian Eropa barat juga memerlukan berpuluh-puluh tahun. Jepang punya demokrasi setelah ia dihantam dalam perang dunia kedua.²⁰

III. Rekonstruksi Tataan Ekonomi

Perekonomian suatu negara bisa diartikan sebagai corong bagi kesejahteraan rakyatnya. Ekonomi yang baik merupakan idaman bagi setiap warga negara. Harga-harga murah dan terjangkau, hasil panen dapat dijual dengan harga layak sesuai dengan ongkos yang dikeluarkan untuk menanam, gaji-gaji tinggi, tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai sesuai dengan bakat dan minat sehingga tidak adanya pengangguran.

Hal-hal sederhana yang cukup rumit di ataslah yang diinginkan rakyat sekarang. Rakyat tidak butuh teori dan janji yang "ndakik-ndakik" dari setiap calon presiden, karena mereka sudah muak dengan rayuan dan bujukan, akan tetapi mereka ingin sebuah kepastian tentang nasib mereka.

Reformasi ekonomi yang kita inginkan bersama bukan hanya pada pemerataan hasil²¹, akan tetapi lebih dari itu adalah perhatian dari semua pihak terutama pemerintah untuk peduli terhadap nasib wong cilik.²²

¹⁹ *Suara Muhammadiyah* No. 15. Th. Ke-89

²⁰ Amien Rais, *Menyembuhkan Bangsa...*, p. 66

²¹ *Ibid.*, p. 31. Reformasi ekonomi itu berarti bahwa kita seluruh bangsa Indonesia ingin melihat sebuah kehidupan ekonomi yang adil tidak lagi ada monopoli di tangan-tangan tertentu.

²² Golongan inilah yang sering dijadikan makanan empuk bagi para pemimpin yang ingin melanggengkan kekuasaannya. Dengan sedikit kata ingin membela wong cilik (walaupun hanya omong kosong) dengan bangga mereka berteriak lantang demi kekuasaan. Golongan ini juga yang tidak mempunyai akses ekonomi, politik dan hukum. Mereka yang terdiri dari buruh, tani, pedagang kaki lima, sopir becak, selalu dijadikan kuda tunggangan guna kepentingan sesaat dan setelah itu mereka dicampakkan begitu saja. Wong cilik tetaplah wong cilik, yang hanya penting pada saat pemilu (misalnya), dan tidak penting lagi setelahnya. Baca Zuly Qodir, "Pemilu 2004, Partai Politik Baru Dan Wong Cilik: Suatu Telaah Etika Praktis", dalam *Jurnal Media Inovasi* No. 2 Th. XII/2003.

Masih banyaknya pengangguran²³, kesenjangan ekonomi yang semakin nyata, kelas sosial semakin nampak sehingga kesenjangan sosial pun terjadi. Rakyat miskin²⁴ semakin miskin, konglomerat semakin kaya.²⁵ Kasus-kasus ketenagakerjaan yang semakin membuat miris semua kalangan.²⁶

Hal ini diperparah oleh ulah obligor nakal yang melarikan dana rakyat. Pemerintah pun cenderung menutup tangan untuk dapat menangani kasus-kasus seperti ini.²⁷ Belum lagi transparansi dana anggaran pendapatan dan

²³ Problem pengangguran ini disebabkan banyak faktor, salah satunya adalah faktor pendidikan. Jika pada tahun 1980 dan tahun 1985 tingkat pengangguran di kalangan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi (Ak/PT) masih tergolong rendah. Akan tetapi pada tahun 1989, angka pengangguran untuk kelompok berpendidikan tinggi semakin melonjak yaitu untuk tamatan akademi, angka pengangguran di pedesaan pada tahun 1985 adalah 1,2% dan tahun 1989 melonjak menjadi 17,4%. Pengangguran tamatan perguruan tinggi tampak dengan jelas di perkotaan dan trendnya semakin meningkat yaitu pada tahun 1980 angka pengangguran tamatan perguruan tinggi adalah 1,3% kemudian melonjak menjadi 7,2% pada tahun 1985, dan naik 3 kali lipat pada tahun 1989 menjadi 21,2%. Lebih lanjut baca, M.M. Papayungan, "Pengembangan Dan Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Menuju Masyarakat Industrial Pancasila", dalam Jimly Asshiddiqie dkk (Ed), *Sumber Daya Manusia untuk Indonesia Masa Depan*, Cet III, (Bandung : Mizan, 1997), p. 115-116.

²⁴ Kemiskinan yang diakibatkan krisis ekonomi 1998 telah menjadikan bangsa ini semakin miskin dengan membengkaknya angka kemiskinan yaitu mencapai 113 juta orang. Pendapatan perkapita kita baru mencapai 760 \$/US pertahun, berada di bawah garis kemiskinan dunia yang dipatok dengan 800 \$/US pendapatan perkapita pertahun. Lihat Musa Asy'arie, *Menggagas Revolusi Kebudayaan Tanpa Kekerasan*, Cet I, (Yogyakarta : LESFI, 2002), p. 41

²⁵ Benni Setiawan, *HAM dan Transformasi Sosial...*, p.37.

²⁶ Kasus-kasus yang terjadi misalnya penganiayaan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri seperti Nirmala Bonet, pengusiran TKI ilegal di Malaysia, penyanderaan TKI di Irak akhir-akhir ini dll. Padahal TKI ini merupakan salah satu peyumbang devisa terbesar bagi bangsa Indonesia. Ironisnya Indonesia sebagai negara pengirim tenaga kerja luar negeri terbesar di Asia Tenggara, Indonesia termasuk paling terbelakang di dalam soal perlindungan tenaga kerja. Hal ini mengingat hampir di dalam seluruh proses penempatan tenaga kerja luar negeri, tenaga kerja tidak diikuti dengan sistem dan perangkat hukum yang memadai yang mampu memberikan perlindungan dari berbagai tindakan penyimpangan sejak proses awal hingga di tempat tujuan....lebih lanjut dalam kondisi yang tidak terlindungi sekalipun, aktivitas produktif yang dilakukan pekerja migran Indonesia di luar negeri tetap dianggap sebagai sumber devisa negara non migas. Meskipun demikian, dalam setiap kebijaksanaan pembangunan yang dihasilkan pada berbagai tingkatan kontribusi migran dalam seluruh proses pembangunan pun hampir tidak diperhitungkan. Lebih lanjut baca, Abdul Haris, "Retorika Politik Perlindungan TKI", *SKH Kedaulatan Rakyat*, 3 Agustus 2004, p. 10.

²⁷ Logika yang terjadi di Indonesia sudah terbolak-balik dengan pembelaan yang gigih dengan gaya menggebrak dengan dalil-dalil argumentasi. Banyak istilah terang-terangan diartikan lain. Utang yang terang-terangan utang disebut pendapatan untuk pembangunan. Pemberian utang yang mengenakan rente disebut donor. Anggaran yang terang-terangan defisit disebut berimbang. Konglomerat jahat yang sudah terang-terangan membebani APBN ribuan trilyun dikatakan harus diberi kepastian untuk berusaha lagi supaya ekonomi tumbuh lebih cepat....nilai tukar yang semakin merosot karena ulah penangan dan perencanaan yang

belanja negara yang tidak karuan kemana larinya, krisis multidimensional yang tak kunjung usai, semakin menambah beban bagi wong cilik dalam mengarungi kehidupan di Indonesia.

Membangun ekonomi Indonesia seharusnya mulai digalakkan dengan membangun kemandirian rakyat, yaitu rakyat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan bakat dan potensi yang ada di dalam dirinya sehingga setiap apa yang mereka lakukan menjadi nyaman dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga. Hal ini tentunya harus didukung dengan etos kerja yang tinggi dan perhatian dari berbagai pihak.

IV. Rekonstruksi Tatanan Hukum

Dalam kajian membangun tatanan hukum di sini akan difokuskan kepada aspek hukum perlindungan anak, dengan asumsi anak adalah aset bangsa yang akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa ke depan.²⁸ Ketika anak-anak dipelihara (hak-haknya) dan diperhatikan serta dikembangkan maka tidak heran jika kehidupan masa depan akan lebih cerah, dan sebaliknya jika hak-hak atas anak diabaikan maka kehancuran bangsa sudah di depan mata.

Anak adalah keturunan kedua.²⁹ Manusia yang masih kecil.³⁰ Orang yang berasal dari atau dilahirkan di suatu negara atau daerah.³¹ Orang yang termasuk di suatu golongan pekerjaan (keluarga).³² Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.³³ Seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun

jelas-jelas merugikan kepentingan bangsa disebut biaya krisis yang harus ditanggung oleh rakyat pembayar pajak, dan masih banyak lagi kepalsuan publik yang sengaja ditutupi guna melindungi kepentingan pribadi dan golongan. Baca Kwik Kian Gie, "Etika Bisnis dan Good Governance", dalam *Jurnal Media Inovasi* No. 2.TH.XIII.2004.

²⁸ Kita mengetahui bersama bahwa peranan *role of the child* "anak adalah harapan masa depan" sebagaimana komitmen politik dalam GBHN. Atau "*anak hon mi do hamoraon di ahu*" (anaku adalah yang paling berharga bagiku) dan "anaku adalah semangat hidupnya (*tondiki*), kata bijak masyarakat etnis Batak. Lihat kata sambutan direktur eksekutif Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LAAI) dalam Muhammad Joni dan Zulchana Z. Tanmas, *Aspek Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Cet 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), p.v.

²⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, p.30

³⁰ *Ibid.*, p. 31

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ Pasal 1 ayat 1 UU. No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

dan belum pernah kawin.³⁴

Dari beberapa pengertian di atas jelas menunjukkan bahwa anak adalah keturunan yang wajib *diuri-uri* demi kelangsungan keturunan baik secara khusus atau luas. Secara khusus merupakan keturunan dalam keluarga, sedangkan dalam arti luas adalah generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.³⁵

Perlindungan anak di Indonesia, walaupun sudah ada undang-undang yang mengaturnya ternyata masih jauh dari makna perlindungan. Kita dapat melihat bagaimana anak-anak usia produktif berkeliaran di jalan, mengamen, tidak sekolah dan sering kali dijadikan pemuasan nafsu sex. Pemandangan ini yang kerap kali membuat gelisah.

Anak-anak di Indonesia banyak yang tidak sekolah dikarenakan melambungnya biaya pendidikan. Sehingga dengan terpaksa mereka turun ke jalan demi mempertahankan hidup. Kekurangan gizi mungkin adalah fenomena yang biasa di Indonesia, anak-anak semakin kurang diperhatikan sehingga hak-haknya juga tidak dipenuhi.

Ada 4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu:³⁶

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*) yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to the highest standard of health and medical care attainable*).
2. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
3. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (*formal dan non formal*) dan hak untuk mencapai standar hidup yang

³⁴ Pasal 1 ayat 2 UU. No. 4 Tahun 1979, LN. 1979-32, tentang Kesejahteraan Anak.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ UNICEF, *Guide to the Covensi on the Rights of the Child (CRC)*, sebagaimana dikutip Muhammad Joni dan Zulchana Z. Tanmas, *Aspek Perlindungan Anak....Ibid.*, p. 35

- layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
4. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak anak untuk mengemukakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views in all matters affecting that child*).

Dalam konvensi hak anak di atas jelas menunjukkan bahwa perlindungan akan anak benar-benar mencerminkan bahwa anak adalah generasi penerus bangsa. Kesejahteraan anak benar-benar diperhatikan dan dilindungi.³⁷

Untuk mendapatkan perlindungan yang maksimal rekonstruksi aturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di Indonesia sudah saatnya diperhatikan dan digalakkan. Seluruh perangkat aparatur negara (hukum) harus bebas dari cengkeraman KKN, peduli terhadap kepentingan bersama dan benar-benar ingin meningkatkan kesejahteraan anak pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

V. Rekonstruksi Tatanan Pendidikan

Berbicara tentang pendidikan sebenarnya sama halnya dengan berbicara mengenai kehidupan. Pendidikan merupakan proses yang dilakukan oleh setiap individu menuju kearah yang lebih baik sesuai dengan potensi kemanusiaan. Proses ini hanya berhenti ketika nyawa sudah tidak ada di dalam raga manusia.³⁸ Driyarkara merumuskan pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia muda yaitu suatu pengangkatan manusia muda ke taraf insani sehingga ia dapat menjalankan hidupnya sebagai manusia utuh dan membudayakan diri. Pendidikan sebagai proses *hominisasi* dan *humanisasi*, membantu manusia muda untuk berkembang menjadi manusia yang utuh, bermoral, bersosial, berwatak, berpribadi, berpengetahuan dan berohani.³⁹

Dalam rekonstruksi pendidikan ini, akan dikaji tentang semakin mahalnya biaya pendidikan yang semakin membuat resah *wong cilik* dan bagaimana moralitas pelajar Indonesia.

³⁷ Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya yang wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Pasal 1 ayat 1 a UU. No. 4 tahun 1979, LN. 1979-32.

³⁸ Benni Setiawan, "Membangun Moralitas Pelajar dalam Proses Pendidikan", dalam *Majalah Gerbang* Edisi. 8. Th.III. Februari 2004, p. 44.

³⁹ *Ibid.*, lihat juga Driyarkara, *Driyarkara Tentang Pendidikan*, (Yogyakarta : Kanisius, 1980)

Biaya pendidikan di Indonesia sekarang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Untuk dapat sekolah orang tua harus mengeluarkan jutaan hingga puluhan juta rupiah guna memperoleh satu kursi pendidikan (sekolah). Kita mengetahui bersama untuk dapat masuk ke PT negeri BHMN⁴⁰ atau pun yang belum BHMN perlu minimal mengeluarkan sumbangan sekurang-kurangnya 5-10 juta rupiah. Apalagi jika kita masuk ke Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Pendidikan yang diharapkan sebagai pembelajaran yang dapat dinikmati oleh semua kalangan ternyata meninggalkan sisa tangis yang begitu mendalam bagi wong cilik.⁴¹ Pendidikan mahal ternyata menyisakan banyak persoalan seperti meningkatnya pengangguran, tingkat kriminalitas yang tinggi dan semakin terpuruknya bangsa ini dalam jurang kebodohan dan kemiskinan.

Kemiskinan yang disebabkan oleh krisis yang tak kunjung usai juga sangat berimbas pada sektor pendidikan. Banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan semakin sempitnya lapangan pekerjaan menambah suram laju pendidikan di negeri ini.

Oleh karena itu, meningkatkan anggaran pendidikan adalah hal yang penting. Pemerintah pada masa yang akan datang harus konsisten mengalokasikan dana pendidikan,⁴² sehingga dapat membebaskan siswa, khususnya anak-anak orang miskin. Peningkatan anggaran pada masa mendatang juga, hendaknya tidak hanya kepada sekolah-sekolah negeri, tetapi juga kepada sekolah-sekolah swasta, sehingga memang pendidikan masa yang akan datang tidak diskriminatif.⁴³

Selain anggaran yang diperhatikan, kita juga tidak boleh lupa akan arti penting pembangunan moralitas bagi pelajar. Pelajar yang nota bene adalah generasi muda penerus bangsa jangan sampai teracuni oleh hal-hal

⁴⁰ BHMN (Badan Hukum Milik Negara) yaitu Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB) serta Institut Pertanian Bogor (IPB), dan akan disusul universitas-universitas lainnya.

⁴¹ Seorang tukang becak menulis di harian *Kedaulatan Rakyat* yang diberi judul "Jeritan Hati Orang Miskin". Ia menulis bagaimana di tahun ajaran baru ia tidak dapat membelikan buku tulis, sepatu, tas. Padahal tas, sepatunya sudah mulai rusak (robek) dimakan usia. Belum lagi penderitaannya membiayai 2 anaknya yang sedang sekolah SD dan SMP yang menunggak pembayaran SPP. Masih banyak lagi contoh penderitaan wong cilik, lebih lanjut baca "Pikiran Pembaca", *SKH Kedaulatan Rakyat*, 3 Agustus 2004.

⁴² Anggaran pendidikan menurut UU adalah 20% dari APBN.

⁴³ Karel Tuhehay, "Format Pendidikan Masa Depan", dalam *Majalah Gerbang* Edisi 1. Th. III. Juli 2003, p. 15.

yang tidak baik seperti, NARKOBA, perkelahian pelajar dan tindakan asusila lainnya. Perhatian dari semua kalangan dimulai dari pendidikan keluarga sebagai benteng awal dan pendidikan pertama siswa, pendidikan sekolah sebagai benteng kedua yang mengajarkan keluhuran budi dengan menghormati sesama teman, guru dan karyawan.

Proses pendidikan yang baik dapat terjalin di lingkungan sekolah apabila warga sekolah dapat saling menghargai, hormat-menghormati, "tepo seliro". Bagaimana guru mengajar (mendidik) yang dapat membuat siswa betah dan nyaman untuk sekolah dan tidak bersikap arogan (baca; meruntuhkan moralitasnya sebagai pelajar) dapat dilakukan dengan; *pertama* guru memperteguh *prinsip of reaction* yang diajarkan Ki Hajar Dewantoro yaitu *ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani* serta *prinsip of reaction* yang coba ditawarkan oleh Priyo Widiyanto, yaitu guru harus dapat menjadi *simbah, simbok dan babu*.⁴⁴

⁴⁴ Prinsip *simbah*, menyatakan bahwa relasi antara guru dan murid harus seperti relasi antara simbah dan cucunya. Maksudnya adalah seluruh relasi guru dan siswa harus didasari oleh relasi cinta kasih tanpa batas, layaknya hubungan antara simbah dan cucunya. Dalam budaya Jawa, menurut pengalaman hidup penulis, simbah adalah sosok individu yang sangat mencintai cucunya. Cinta yang tanpa batas itu menyebabkan cucu dapat begitu dekat, akrab, dan manja kepada simbah. Relasi guru dan siswa di kelas pun seharusnya demikian, yaitu didasari oleh relasi cinta yang tanpa batas.

Prinsip *simbok* menyatakan bahwa relasi antara guru dan murid harus seperti relasi antara simbok dan anaknya. Maksudnya adalah guru harus selalu berupaya agar siswanya memiliki keteraturan hidup, seperti relasi antara simbok dan anaknya. Dalam budaya Jawa, menurut pengalaman hidup penulis, Simbok dalam kehidupan keluarga adalah sosok individu yang menekankan keteraturan hidup kepada anaknya. Simbok selalu mengajarkan banyak hal kepada anaknya, antara lain mengajarkan bangun dan pergi tidur tepat pada waktunya, rajin bekerja dan belajar, rasa hormat pada orang tuanya, dan keterampilan hidup lainnya. Seringkali *simbok* mengajarkan itu semua dengan rangkaian instruksi yang mencerminkan otoritas *simbok*. Segala pelajaran dilakukan oleh *simbok* dengan tujuan agar anaknya semakin berkembang di kemudian hari. Relasi guru dan siswa di kelas pun seharusnya seperti relasi antara *simbok* dan anak di rumah.

Prinsip *babu* menyatakan bahwa relasi guru dan siswa harus seperti relasi antara *babu* dan tuannya. Maksudnya adalah guru harus siap melayani siswanya secara total, seperti relasi antara *babu* dan tuannya. Dalam budaya Jawa, *babu* dalam keluarga merupakan sosok individu yang sangat patuh pada perintah tuannya. *Babu* adalah manusia yang selalu siap untuk disuruh melayani segala keperluan tuannya. Di sisi lain, seharusnya *babu* menjadi *batu* yang berarti harus mampu dijadikan *mbatbataning catur* (mampu diajak berdiskusi). Relasi guru dan siswa di kelas pun seharusnya seperti relasi antara *babu* dan tuan dalam kehidupan keluarga di rumah, yaitu guru harus siap melayani dengan segala ketulusan hati agar siswanya dapat terus berkembang dan berprestasi. Baca, Priyo Widiyanto, "Relasi Manusia dalam Bingkai Keluhuran Budi", dalam Paulo Suparno dkk *Problematika Manusia Indonesia*, (Yogyakarta : Penerbitan Universitas Sanata Dharma, 2001). Baca juga Benni Setiawan, "Membangun Moralitas Pelajar...", p. 44-45.

Dalam membangun moralitas pelajar dalam proses pendidikan terdapat empat elemen penting yang dijadikan bentengnya, yaitu: pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, pendidikan masyarakat, peran serta dan perhatian dari pemerintah.⁴⁵

VI. Simpulan

Dari pemaparan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan: *Pertama*, dalam bidang politik, kontrol dari rakyat agar jalannya pemerintahan tetap berpihak kepada rakyat mutlak diperlukan. Yaitu dengan rakyat banyak belajar akan arti penting demokrasi dan belajar dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya sehingga rakyat tidak mudah dibohongi dengan janji-janji semu.

Kedua, dalam bidang ekonomi; Membangun ekonomi Indonesia seharusnya mulai digalakkan dengan membangun kemandirian rakyat, yaitu rakyat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan bakat dan potensi yang ada di dalam dirinya sehingga setiap apa yang mereka lakukan menjadi nyaman dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga. Hal ini tentunya harus didukung dengan etos kerja yang tinggi dan perhatian dari berbagai pihak.

Ketiga, bidang hukum terutama dalam bidang perlindungan anak diperlukan rekonstruksi aturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Seluruh perangkat aparaturnegara (hukum) harus bebas dari cengkeraman KKN, peduli terhadap kepentingan bersama dan benar-benar ingin meningkatkan kesejahteraan anak pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Keempat, bidang pendidikan, (1) Pemerintah harus meningkatkan anggaran pendidikan. Pemerintah pada masa yang akan datang harus konsisten mengalokasikan dana pendidikan 20% dari anggaran APBN agar supaya *wong cilik* tetap dapat menikmati pendidikan sebagai hak bagi setiap warga negara. (2) Perhatian secara serius, konsisten dan berkesinambungan dari pihak keluarga, sekolah, masyarakat dan pemerintah untuk mencegah terjangkitnya penyakit masyarakat dari golongan terpelajar.

⁴⁵ *Ibid.*,

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, 2000, *Titian Menuju Demokrasi*, Jakarta : Gramedia
- Amien Rais, 1999, *Menyembuhkan Bangsa yang Sakit*, Cet I, Yogyakarta : Adipura
- Barents, J., 1965, *Ilmu Politika: Suatu Perkenalan Lapangan*, penerjemah L.M. Sitorus Jakarta : P.T. Pembangunan
- Benni Setiawan, 2004, "HAM dan Transformasi Sosial", dalam *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 38. No. I,
- _____, 2004, "Membangun Moralitas Pelajar dalam Proses Pendidikan", dalam *Majalah Gerbang* Edisi. 8. Th.III.
- Driyarkara, 1980, *Driyarkara tentang Pendidikan*, Yogyakarta : Kanisius
- Effendy, A Wahab al-, 2000, *Masyarakat Tanpa Negara*, Yogyakarta : LKiS
- Jimly Asshiddiqie, dkk (Ed), *Sumber Daya Manusia untuk Indonesia Masa Depan*, Cet III, Bandung : Mizan
- Kardiman, "Analisis Pengaruh Gejolak Politik dan Regulasi terhadap Gejolak Ekonomi Moneter di Indonesia", dalam www.rudyet.tripod.com/sem2-012/kardiman.htm
- Karel Tuhehay, 2003, "Format Pendidikan Masa Depan", dalam *Majalah Gerbang* edisi 1. Th. III. Juli 2003
- Kwik Kian Gie, 2004, "Etika Bisnis dan Good Governace", dalam *Jurnal Media Inovasi* No. 2.TH.XIII, .2004.
- Majalah Suara Muhammadiyah*, edisi No. 15. Th, ke-89
- Miriam Budiardjo,2001, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cet XXII, Jakarta : Gramedia Pustaka
- Muhammad Joni dan Zulchana Z. Tanmas, 1999, *Aspek Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Cet I, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Musa Asy'arie, 2002, *Menggagas Revolusi Kebudayaan tanpa Kekerasan*, Cet I, Yogyakarta : LESFI
- SKH *Kedaulatan Rakyat*, Tanggal 3 Agustus p2004.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet 2, Jakarta: Balai Pustaka
- UU. No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- UU. No. 4 Tahun 1979, LN. 1979-32, tentang Kesejahteraan Anak
- Widiyanto T. Priyo, 2001, "Relasi Manusia Dalam Bingkai Keluhuran Budi", dalam Paulo Suparno dkk *Problematika Manusia Indonesia*, Yogyakarta : Penerbitan Universitas Sanata Dharma

William Chang, 2002, *Kerikil-kerikil di Jalan Reformas ; Catatan-catatan dari Sudut Etika Sosial*, Cet I, Jakarta : Kompas

[www.ut.ac.id/ol-supp/ppkn/3301/batasan- htn dan-politik.htm](http://www.ut.ac.id/ol-supp/ppkn/3301/batasan-hn-dan-politik.htm)

Zuly Qodir, "Pemilu 2004, Partai Politik Baru dan Wong Cilik: Suatu Telaah Etika Praktis" *Jurnal Media Inovasi* No. 2 Th. XII/2003.

